

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014.
- Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II-Sertipikat dan Permasalahannya*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002).
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2019).
- Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, "Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Endang Pandamdari, *Hukum Agraria Indonesia*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024).
- James Julianto Irawan, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017).
- Suroso Ismuhadi, *dkk, Pendaftaran tanah di Indonesia* (Jakarta : P.T. Relindo Jayatama, 1997).
- Urip Santoso, *Hukum Agraria, Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012).

### **Jurnal Nasional:**

- Amoury Adi Sudiro dan Ananda Prawira Putra, "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PENDAFTARAN TANAH DAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH YANG TELAH DIDAFTARKAN", *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan) Universitas Al Azhar Indonesia*, Vol. V No. 1 Januari Tahun 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v5i1.2370>

- Brian Eric Hamenda dan Goodlieb N. Mamahit dan Daniel F. Aling, "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah yang Disebabkan Oleh Penerbitan Sertipikat Yang Cacat Hukum", Vol. IX/No. 3/Apr/2021.
- Hulu, Klaudius I. "Kekuatan Alat Bukti sertipikat Hak Milik Atas Tanah dalam Bukti Kepemilikan Hak." Jurnal Panah Keadilan, vol. 1, no. 1, 2021, pp. 27-31.
- I Kadek Edy Gunawan dan A. A Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, "Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata", Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020 Hal. 358-361. DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2549.358-361> .  
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>
- Luvianti, Teressyavira, and Rasji Rasji. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Yang Tumpang Tindih (Overlapping) Kepemilikan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 221 PK/PDT/2014)". UNES Law Review 6, no. 2 (December 12, 2023): 5076-5083. Accessed July 21, 2024. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1336>.
- M. N. Ardani, "Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum," Gema Keadilan, vol. 6, no. 3, pp. 268-286, Dec. 2019.  
<https://doi.org/10.14710/gk.2019.6659>
- Muhammad Zakaria, Syuryani dan Mahlil Adriaman, "Penyelesaian Sengketa Overlapping Sertipikat Hak Atas Tanah Kota Payakumbuh", Sakato Law Journal, Vol. 1, (2023).  
<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/5017>
- Novia Tika Febriana dan Murry Darmoko A., "Langkah Hukum Terhadap Sengketa Tumpang Tindih (Overlapping) Atas Hak Sertifikat Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 181/B/2020/PT.TUN.SBY)", Jurnal Judiciary, Vol. 11 No. 1 (2022).
- Oe, Meita. n.d. Review of Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah. Universitas Bandar Lampung .  
<https://media.neliti.com/media/publications/26777-ID-tugas-dan-fungsi-badan-pertanahan-nasional-dalam-pendaftaran-tanah.pdf>.
- Radina, Thania A., Nur Adhim, and Triyono Triyono. " Penyelesaian Sengketa Tanah Overlapping Melalui Proses Mediasi Di Kantor Pertanahan Kota Semarang (Studi Kasus di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota

Semarang)." Diponegoro Law Journal 10, no. 2 (2021): 505-518. Accessed : July 11, 2024. <https://doi.org/10.14710/dlj.2021.30501>

Ramadhani, R. (2021). "Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah", SOSEK: Jurnal Sosial & Ekonomi 2, No. 1, 31-41.

Sari, Indah. 2020. "Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)." Jurnal Mitra Manajemen 9, no. 1 (October).<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/492/457>.

Sari, Ni Luh Ariningsih. "Konsep hak menguasai negara terhadap tanah dalam hukum tanah (uupa) dan konstitusi." Ganec Swara 15, no. 1 (2021): 991-998. DOI: <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.202>

#### **Hasil Penelitian:**

Arie Lestario dan Erlina, "Sistem Pendaftaran Tanah yang memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak atas Tanah di Indonesia, Master of Notary, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Volume 1 Issue 1, January 2022: pp. 1-30. Copyright @ NoLaJ. DOI: <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i1.1>

Endayani, Riskiana (2024) "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih (Overlapping) Sertipikat Tanah Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Semarang)". Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Khasanah, Uswatun (2016) Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Sertipikat Hak Atas Tanah Ganda (Overlapping) (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 233/PDT/2015/PT.BDG). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Manurung, Siti Hardianti Rukmana, and Abdul Sadad. "Strategi Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dalam Meminimalisir Permasalahan Tumpang Tindih Sertifikat Tanah (Overlapping) di Kota Pekanbaru." PhD diss., Riau University, 2017.

Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)" Volume IV Nomor 1, (2013): ISSN 2085-0212, DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>

Rudy Setiawan, "Urgensinya Persertifikatan Tanah Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Desa Rempek)". Skripsi, Mataram: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

Tarigan, "Bab II Landasan Teori 1.1 Uraian Teori -Teori Kepastian Hukum Universitas Medan Area." Skripsi, Medan: Program Studi Hukum Universitas Medan Area 2017.  
[https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1435/5/138400056\\_File5.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1435/5/138400056_File5.pdf).

Tri Anik Widiastuti, "Peranan Peta Pendaftaran Dalam Upaya Menjamin Kepastian Hukum Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". Skripsi, Daerah Istimewa Yogyakarta: Program Studi Pertanahan Jurusan Perpetaan, 2021.  
<http://repository.stpn.ac.id/2460/1/Tri%20Anik%20Widiastuti.pdf>

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tahun 1847

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 2043)

**Putusan:**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor Putusan Nomor:  
71/G/2020/PTUN-SRG

**Website:**

S.H, Sovia Hasanah. 2017. "Pendaftaran Tanah Secara Massal."  
Www.hukumonline.com. 2017.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendaftaran-tanah-secara-massal-1t5902cfc843d40/>.

**Kamus:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia

